

**ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PARA PIHAK
PADA USAHA PERCETAKAN AL-YUSNI ADVERTISING
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ARIF SETIA BUDI
011800105**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIF SETIA BUDI
NIM : 011800105
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
PERJANJIAN PARA PIHAK PADA USAHA
PERCETAKAN AL-YUSNI ADVERTISING
PALEMBANG



Palembang, Mei 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH,MH

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PARA PIHAK PADA USAHA PERCETAKAN AL-YUSNI ADVERTISING PALEMBANG

Penulis,
ARIF SETIA BUDI
011800105

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
Rosa Linda, SH., M.H.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Salah satu contoh bagaimana suatu negara disebut negara berkembang dapat dilihat dari sisi hukum yang diterapkan di suatu negara tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan antar masyarakat Indonesia, masyarakat melakukan interaksi timbal balik yang menguntungkan satu sama lain. Hubungan kerjasama yang mengikat merupakan wujud dari suatu perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Hukum Perjanjian Dalam Mengikat Para Pihak dan untuk mengetahui Penyelesaian Wanprestasi Antara Para Pihak Pada Usaha Percetakan Al-Yusni Advertising Palembang.

Penulisan ini dilakukan dengan metode "*Yuridis Normatif*" atau studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Simpulan Kedudukan Hukum Penerapan klausula baku dalam Foto Copy & Percetakan Al-Yusni berdiri yang memuat ketentuan yang dilarang dalam undang undang menjadikan klausula baku tersebut menjadi tidak sah untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Pasal 1493 KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan tidak secara langsung menyatakan pelarangan terhadap penerapan klausula baku. Pelarangan yang ditegaskan adalah pada klausula baku yang dapat menempatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha pada kedudukan yang tidak seimbang, seperti dalam perjanjian parkir pada umumnya yang merugikan konsumen parkir. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha yang telah mencantumkan atau membuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut dan Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha Foto Copy & Percetakan Al-Yusni berdiri meliputi: (1) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan yaitu terlambat dalam menyelesaikan pesanan barang dan kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan, (2) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan adalah pemesan tidak mengambil barang. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian. Dimana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Wanprestasi.....	13
B. Pengertian Perjanjian	23
C. Pengertian Percetakan	34
BAB III. ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PARA PIHAK PADA USAHA PERCETAKAN AL-YUSNI ADVERTISING PALEMBANG	
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Dalam Mengikat Para Pihak	39
B. Penyelesaian Wanprestasi Antara Para Pihak Pada Usaha Percetakan Al-Yusni Advertising Palembang	45
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Penerapan klausula baku dalam Foto Copy & Percetakan Al-Yusni berdiri yang memuat ketentuan yang dilarang dalam undang undang menjadikan klausula baku tersebut menjadi tidak sah untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan tidak sesuai dengan Pasal 1493 KUH Perdata. Peraturan perundang-undangan tidak secara langsung menyatakan pelarangan terhadap penerapan klausula baku. Pelarangan yang ditegaskan adalah pada klausula baku yang dapat menempatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha pada kedudukan yang tidak seimbang, seperti dalam perjanjian parkir pada umumnya yang merugikan konsumen parkir. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha yang telah mencantumkan atau membuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

2. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada usaha Foto Copy & Percetakan Al-Yusni terdiri meliputi: (1) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak percetakan yaitu terlambat dalam menyelesaikan pesanan barang dan kelalaian pihak percetakan sehingga mengakibatkan pemesan tidak menerima barang pesanan, (2) wanprestasi yang disebabkan oleh pihak pemesan adalah pemesan tidak mengambil barang. Adapun penyelesaian wanprestasi yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu dengan menempuh jalur perdamaian. Dimana para pihak mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Foto Copy & Percetakan Al-Yusni dalam menjalankan usahanya diharapkan tidak lagi menerapkan klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pelaku usaha dan sebaiknya segala bentuk pengalihan tanggung jawab. Hal ini dikarenakan klausula baku tersebut menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, yaitu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
2. Bagi pihak percetakan dalam hal barang tidak di ambil pemesan seharusnya melaporkan kepada lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Dengan adanya bantuan pihak kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikata*, Alumni, Bandung, 2002.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anne Dameria, *Digital Printing*, Intrans, Jakarta, 2009.
- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, Crintine S.T. Kansil, *Modul hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Cartamarasdjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha bertujuan Laba*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1991.
- Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid Volume 3 Nomor 1 Edisi Januari – Juni 2017.
- Dessy Danarti dan Suryo Sukendro, *Pencetakan Digital*, Alumni, Bandung, 2008.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, 2000.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Hasim Purba, *Modul Kuliah Hukum Perikatan*, Perpustakaan USU, Medan, 2010
- JT Lewi, G Djajaputra, *Sanksi Hukum Bagi Pengurus Yang Menghalangi Proses Pemberesan Kekayaan Yayasan Yang Dibubarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Berdasarkan Putusan Mahkamah*